



**Pemkot Siap**  
 Sambungan Hal 9

Seperti diberitakan, warga RT 37 dan 38 sekitar Jalan Babaran, Celeban, Tahanan, Umbulharjo, Yogyakarta yang terdampak proyek SAH Supomo Cs. Mereka berharap segera ada tindak lanjut dari Pemkot Yogyakarta menyusul terhentinya proyek tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan yang dirasakan warga.

"Tadi memang sempat ditanyakan oleh beliau (Sultan HB X) karena mulai ada warga yang mengeluh terganggunya akses terkait proyek SAH. Kami, konsultasi KPK seperti apa yang bisa dilakukan untuk me-recovery agar tidak mengganggu," jelasnya.

Haryadi mengatakan, sejauh ini pihaknya menunggu fatwa atau surat tertulis dari KPK mengenai hal ini. Bahkan, Haryadi sempat menyebutkan jika bisa saja perusahaan pelaksana proyek diputus kontrak kemudian ada lelang lagi dan pekerjaan dilaksanakan.

"Kami sudah siap anggarannya. Mau putus kontrak lalu dikerjakan atau apalah nanti fatwanya bagaimana. Yang penting proyek harus jalan terus, itu kan yang diekal orangnya bukan kemudian proyeknya berhenti kira-kira begitu. Tunggu surat tertulis KPK," ulasnya.

Haryadi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, yang dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek SAH Supomo, Rabu (11/9) lalu. "Ya, (Pak Agus) lapor sudah melaksanakan penangkilan itu, koordinasi seperti itu. Kepala dinas lapor ke Wali Kota biasanya," jelasnya.

Selain membahas mengenai kelanjutan proyek SAH Supomo, Haryadi juga bertemu Sultan terkait dengan surat persetujuan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Termasuk, koordinasi beberapa hal. "Sudah ada rapur dan untuk ditindaklanjuti agar bisa dikukuhkan sehingga pembahasan anggaran tidak terlalu lama. Saat ini hanya ada fraksi belum ada alkarnya," jelasnya.

**Hati-hati**  
 Sekda DIY, Gatot Saptadi mengatakan, pemerintah memang berhati-hati untuk kelanjutan proyek SAH Supomo Cs. ini. Hal ini karena berkaitan dengan persoalan hukum mengenai kontrak proyek dan berbagai hal lainnya.

"Kalau ditutup bisa-bisa saja misalnya dengan putus kontrak, tapi memang harus hati-hati dengan masalah ini. Kalau Pak Wali (Kota Yogyakarta) tadi tunggu fatwa tertulis dari KPK," urainya.

Gatot mengatakan, jawaban tertulis dari KPK untuk saat ini memang belum ada. Dia juga menambahkan, pihak kejaksaan pun hingga saat ini masih melihat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukannya ini apakah perorangan atau perusahaan yang bersangkutan. "Kalau ini OTT perorangan maka bisa jalan terus, tapi kalau terkait perusahaan harus setop. Harus hati-hati," jelasnya. (ais)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 10 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005